

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

**1. PETUGAS PERSIDANGAN**

Desk : 2  
Provinsi : Papua Barat  
Pimpinan Sidang 1 : Direktur Regional III  
Pimpinan Sidang 2 : Direktur Pertahanan dan Keamanan  
Notulis Aplikasi : Elita Ratnasari  
Notulis Offline : Aisah Tri Wahyuni  
Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
1. Bappeda Provinsi Papua Barat	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Direktorat Transportasi
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat	2. Kementerian Pertanian	2. Direktorat Pangan dan Pertanian
3. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat	3. Kementerian Perhubungan	3. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat
4. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat	4. Kementerian Ketenagakerjaan	4. Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
5. Dinas Perhubungan Papua Barat	5. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5. Direktorat Agama, Pendidikan & Kebudayaan
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat	6. Kementerian Kesehatan	6. Direktorat Pendidikan Tinggi, dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
7. Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat	7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	7. Direktorat Ketenagakerjaan
8. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat		8. Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman
		9. Direktorat Sumber Daya Air

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

**2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN**

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
1	Pembangunan BLK	1	1	unit	Kab. Kaimana	Kementerian Ketenagakerjaan	Direkomendasikan dengan catatan usulan pembangunan bukan pembangunan fisik, lokasi di Manokwari Selatan dan jenis BLK UPTD, selain itu kelengkapan SOTK		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	2217 - Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	QEI - Bantuan Lembaga		004 - Bantuan Peralatan Lembaga Pelatihan Kerja UPTD-INPRES 9 2020			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
Bappeda Provinsi Papua Barat : - Data dukung terkait aset dan lahan belum tersedia - Pemda Manokwari Selatan sudah siap untuk menyiapkan lahan di Oransbari - Aset lahan sudah siap Dinas Tenaga Kerja Papua Barat: - Proses pembangunan BLK sudah dimulai dari 3 tahun yang lalu, khusus 2024 sudah masuk dalam tahap ke 4, dan akan dilanjutkan tahap ke 5 untuk beberapa <i>workshop</i> karena sudah diminta Kemenaker untuk mempercepat		Kementerian Ketenagakerjaan : - BLK akan menjadi UPTD atau UPTP? - Tidak bisa mengakomodir untuk UPTD sehingga bisa diajukan ke Pemerintah Provinsi, namun apabila perlu menjadi UPTP maka diperlukan hibah dahulu - Pelatihan dan <i>upgrading</i> instruktur bisa diakomodir dengan berkoordinasi dengan BPVP Sorong - Kebijakan pembangunan BLK satu provinsi adalah satu BLK, untuk pembangunan fisik harus berupa UPTP, apabila masih milik provinsi		Dit. Ketenagakerjaan : - Apakah penyerahan aset sudah siap? karena kepemilikan lahan harus milik pusat - Perlu penyiapan dokumen data dukung dahulu untuk diusulkan tahun depan atau oemprov membangun dahulu dengan APBD, lalu apabila sudah siap bisa diserahkan ke pusat dan lalu bisa diusulkan bantuan peralatan dan infrastruktur lainnya  Pimsid 1:					

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akan diusulkan sarana dan prasarana BLK untuk dibantu kemenaker</li> <li>- Pemprov Papua Barat mendorong untuk sertifikasi dan pelatihan</li> <li>- Mengenai lahan sudah siap, sekitar 4,9 Ha</li> <li>- Workshop juga akan diselesaikan</li> <li>- BLK nya adalah UPTD berupa penguatan peralatan dan instruktur</li> <li>- Lokasi di Oransbari</li> <li>- Rencana pembangunan memang sedang berproses</li> <li>- BLK di Manokwari Selatan sudah siap dari 75% dana otsus pembangunannya, sisa kelengkapannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>berupa pengadaan sarana prasarana dan alat</li> <li>- BLK Papua Barat saat ini merupakan binaan dari BPVP Sorong</li> <li>- Bantuan yang bisa diakomodir berupa peralatan, pelatihan, dan instruktur, apabila BLK ingin diubah menjadi pusat maka perlu adanya hibah dahulu baru bisa dilakukan pembangunan fisik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu menentukan dulu BLK yang akan dikembangkan Papua Barat dimana</li> </ul>					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
2	Pengembangan Bandar Udara Anggi	1	1	unit	Kab. Pegunungan Arfak	Kementerian Perhubungan	Direkomendasikan dengan catatan perlu penyesuaian geotagging		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	4645 - Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	RBE - Prasarana Bidang Konektivitas Udara		036 - Pengembangan Bandar Udara Anggi			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024	Kementerian Perhubungan : - Pengembangan Bandara Udara Anggi menjadi prioritas 2025 untuk penyelesaian Masterplan berupa pengembangan fasilitas sisi darat karena fasilitas sisi udara sudah memenuhi	Dit. Transportasi : - Usulan ini sudah diakomodir  Geotagging: Bisa disesuaikan kembali titiknya					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
3	Pengadaan tenaga kesehatan	30	30	Orang	Provinsi Papua Barat	Kementerian Kesehatan	Direkomendasikan		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		01 - Kesehatan untuk Semua			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	6822 - Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	SCM - Pelatihan Bidang Kesehatan		105 - Peningkatan Kompetensi Melalui Program Fellowship (SDM-23)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
Bappeda Provinsi Papua Barat : - Sudah ada Fakultas Kedokteran dan diharapkan ada kegiatan Kemenkes di Ibukota provinsi yaitu Kab. Manokwari  Dinas Kesehatan Papua Barat: Terkait dengan pelatihan dari Kemenkes apakah pelatihan kepada para perencana di dinas kesehatan	Kementerian Kesehatan : - Ada pendampingan untuk 37 kab di papua - Kemenkes menyelenggarakan pendampingan, 5 diantaranya di papua barat, kerjasama bappenas, kemendagri, dan univ. 5 kab kota yg manokwari, teluk bintuni, wondama, mansel, kaimana, memberikan penguatan terhadap		Dit. KGM: - Tetap diakomodir dan sejalan dengan belanja K/L yang menjadi prioritas						

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		kabupaten yang melibatkan bidang bidang kabupaten	perencana dinkes, berkaitan perencanaan kesehatan daerah di balai besar pelatihan di makasar, 27 Mei rencananya - Untuk 2025 berupa proses pelatihan, sedangkan pendampingan oleh Universitas akan datang ke daerah					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
4	Pemenuhan tenaga dokter	100	100	Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Provinsi Papua Barat</li> <li>o Kab. Fak Fak</li> <li>o Kab. Kaimana</li> <li>o Kab. Teluk Wondama</li> <li>o Kab. Teluk Bintuni</li> <li>o Kab. Manokwari</li> <li>o Kab. Manokwari Selatan</li> <li>o Kab. Pegunungan Arfak</li> </ul>	Kementerian Kesehatan	<b>Direkomendasikan</b>	
Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional				
01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		01 - Kesehatan untuk Semua				
Program		Kegiatan		KRO		RO		
DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		6823 - Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan		QEJ - Bantuan Pendidikan Tinggi		002 - Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PDGS) Papua dan Papua Barat (SDM-21)		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

No	Usulan	Volume				Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan						
5	Intensifikasi Tanaman kakao berupa pemangkasan kebun kakao dan pembersihan lahan	100	100		Ha	Kab. Manokwari Selatan	Kementerian Pertanian	Direkomendasikan	
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5888 - Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	RAI - Sarana Pengembangan Kawasan		007 - Kawasan Kakao			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024		Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024		Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

6	ekstensifikasi /perluasan tanaman pala	200	200	Ha	Kab. Kaimana	Kementerian Pertanian	Direkomendasi kan		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5888 - Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	RAI - Sarana Pengembangan Kawasan		002 - Kawasan Pala			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024		Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024		Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024					
<b>No</b>	<b>Usulan</b>	<b>Volume</b>		<b>Satuan</b>	<b>Lokasi Kab/Kota</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>	<b>Hasil Kesepakatan</b>		
		<b>Usulan</b>	<b>Kesepakatan</b>						
7	ekstensifikasi /perluasan tanaman jagung	500	500	Ha	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kab. Fak Fak</li> <li>○ Kab. Kaimana</li> <li>○ Kab. Teluk Wondama</li> <li>○ Kab. Teluk Bintuni</li> </ul>	Kementerian Pertanian	Direkomendasi kan dengan catatan perlu dilengkapi data dukungannya seperti CPCL dan Geospasial, serta lokasi		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		HA - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	4579 - Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	RAI - Sarana Pengembangan Kawasan	002 - Area penyaluran benih jagung	<b>yang lebih spesifik dan strategis, serta volume dan anggaran disesuaikan pasca TM</b>	
<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		<p>Bappeda Provinsi Papua Barat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ini merupakan arahan dari Wamen dan dilanjutkan dengan pertemuan Gurbanur di Jakarta</li> <li>- Perluasan sekitar 1000 Ha, tetapi dalam pelaksanaannya hanya 500 Ha</li> <li>- Untuk RO yang diberikan hanya bantuan bibit sedangkan yang diinginkan adalah paket lengkap berupa sarana pendukung juga</li> </ul> <p>Dinas Pertanian Papua Barat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara fisik sudah disiapkan 500 Ha, untuk lokasi sudah disiapkan pada 6 Kab dengan spesifik distrik sampai kampung</li> <li>- Selain sebagai konsumsi, tapi dikembangkan jagung hibrida</li> </ul>	<p>Kementerian Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk tanaman jagung, posisi pagu terbatas sehingga untuk kegiatan ini belum ada pembahasan sehingga belum masuk ke rancangan</li> <li>- Pagu sat ini hanya untuk kegiatan <i>baseline</i> atau <i>mandatory</i></li> <li>- Meskipun ada direktif dari Wamentan, maka masuknya ke RO penyaluran benih jagung dan akan ada penyesuaian pasca TM untuk volume dan alokasinya</li> <li>- Perlu disampaikan notulensinya pada saat kunjungan untuk bisa diusulkan saat musrenbang pertanian</li> </ul>	<p>Dit. Pangan dan Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu penyiapan RC nya untuk dilengkapi</li> <li>- CPCL dan geospasial yang perlu dilengkapi</li> <li>- Diakomodir dengan catatan perlu dilengkapi CPCL dan geospasial</li> </ul>			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
8	sarana pasca panen dan pengolahan padi	20	20	Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kab. Fak Fak</li> <li>o Kab. Teluk Wondama</li> <li>o Kab. Teluk Bintuni</li> <li>o Kab. Manokwari</li> </ul>	Kementerian Pertanian	<b>Tidak Direkomendasikan</b>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

					o Kab. Manokwari Selatan		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>	
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>	
		EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5885 - Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	RAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		001 - Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>					
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>	
		<p>Bappeda Provinsi Papua Barat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dokumen yang diminta sudah tersedia</li> </ul> <p>Dinas Pertanian Provinsi Papua Barat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RC sudah disiapkan di 5 kabupaten dan lokasi ini merupakan kawasan dari padi sawah ada di Manokwari, Teluk Bintuni, Fakfak, Manokwari Selatan, dan Teluk Wondama</li> </ul>		<p>Kementerian Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum dibahas terkait penyediaan sarana pasca panen pada Rakortek pertanian, sehingga belum bisa disepakati</li> <li>- Anggaran masih terbatas</li> </ul>		<p>Dit. Pangan dan Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih menyesuaikan dengan kementan juga, tetapi diusulkan untuk sarana pasca panen juga</li> <li>- Untuk menu DAK tahun depan belum ada saran prasarana pasca panen</li> <li>- Akan dibahas kembali dengan Kementan</li> </ul>	
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
9	Penyaluran pupuk subsidi	6	6	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kab. Fak Fak</li> <li>o Kab. Kaimana</li> <li>o Kab. Teluk Wondama</li> <li>o Kab. Teluk Bintuni</li> </ul>	Kementerian Pertanian	Direkomendasikan

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

					<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kab. Manokwari</li> <li>○ Kab. Manokwari Selatan</li> </ul>			
		<b>Agenda Pembangunan</b>	<b>Sasaran Visi</b>	<b>Arah Pembangunan Nasional</b>				
		02 - Transformasi Ekonomi	02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan	04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi				
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>			
		HA - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3993 - Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	QAA - Pelayanan Publik kepada masyarakat	001 - Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Divalidasi dan Diverifikasi			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>						
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>				
		Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024	Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024	Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024				
<b>No</b>	<b>Usulan</b>	<b>Volume</b>		<b>Satuan</b>	<b>Lokasi Kab/Kota</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>	<b>Hasil Kesepakatan</b>	
		<b>Usulan</b>	<b>Kesepakatan</b>					
<b>10</b>	Pelatihan bagi petani	100	100	Orang	Provinsi Papua Barat	Kementerian Pertanian	<b>Direkomendasikan</b>	
		<b>Agenda Pembangunan</b>	<b>Sasaran Visi</b>	<b>Arah Pembangunan Nasional</b>				
		02 - Transformasi Ekonomi	02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan	04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi				
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>			
		DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1812 - Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001 - Percontohan penerapan Teknologi Pertanian			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas					
		Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024	Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024	Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
11	pengembangan situs aitumeri	1	1	Kawasan	Kab. Teluk Wondama	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Direkomendasikan		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		13 - Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	4275 - Pelindungan Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	RDN - OM Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan		002 - Warisan Budaya yang Dilindungi			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
Disbudpar Provinsi Papua Barat : - Pada rakortek sudah dijelaskan bahwa sampai zonasinya sehingga tinggal sidang penetapannya dan finalisasi MR, masih status ODCB untuk selanjutnya diusulkan ke nasional - Dari semua ODCB yang sudah dikaji dan paling atas peringkatnya adalah		Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024		Dit. APK : - Usulan ini perlu merujuk pada hasil kajian Objek Diduga Cagar Budaya Situs Aitumeri yang saat ini masih berproses. Apabila hasil kajian ODCB Situs Aitumeri sudah ada, Intervensi akan disesuaikan dengan hasil kajian dan kewenangan					

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		Papua Barat karena awal peradaban semua orang papua mulai mengenal pendidikan dan baca tulis, sehingga perlu direkomendasikan untuk 2025			<p>pengelolaan CB sesuai UU 11/2010</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervensi Kemendikbudristek untuk CB nasional, kalau di bawahnya bukan pengembangan kawasan</li> <li>- Untuk saat ini, kami rekomendasikan ditolak dahulu, menantikan hasil kajian dan penetapan CBN, agar nantinya dapat diusulkan untuk intervensi pengembangan kawasan CBN tersebut.</li> </ul>				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
12	Pembangunan Jalan Manokwari - Pegaf	10	10	Km	Kab. Pegunungan Arfak	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tidak Direkomendasikan		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	RBC - Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		003 - Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024	Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024	Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
13	Pembangunan air bersih	50	50	Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Kab. Fak Fak</li> <li>o Kab. Kaimana</li> <li>o Kab. Teluk Wondama</li> <li>o Kab. Teluk Bintuni</li> <li>o Kab. Manokwari</li> <li>o Kab. Manokwari Selatan</li> <li>o Kab. Pegunungan Arfak</li> </ul>	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Direkomendasikan dengan catatan daerah perlu menyiapkan kelengkapan RC, serta memastikan geotagging dan peyesuaian volume dan satuan	
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>		
		IA - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4973 - Penyelenggaraan Air Minum yang Layak	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		007 - Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat		
<b>Catatan dan Tanggapan</b>								
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		<p>Bappeda Provinsi Papua Barat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan ini untuk penurunan <i>stunting</i> , sehingga perlu dukungan</li> </ul> <p>Dinas PUPR Papua Barat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesiapan RC</li> </ul>	<p>Kementerian PUPR :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu direview lagi RC nya karena sudah ada lokus yang terlayani dengan optimal tetapi bisa diakomodir</li> <li>- Perlu dipastikan Lembaga masyarakatnya apakah ada pengelolanya dan apakah nanti infrastruktur yang terbangun bisa dikelola masyarakat</li> <li>- Akan ada pelatihan berupa koordinasi dengan Balai juga</li> </ul> <p>BPIW PUPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil konreg usulannya berada di 7 kabupaten, tetapi yang diakomodir hanya 3 kabupaten, di Fakfak volume 20 SR anggaran 4 miliar, Teluk Wondama (Anggris dan Wayamaru) dengan volume 200 SR dengan biaya 5 Miliar, Manokwari Selatan SPAM IKK Momiwaren volume 20 SR (5 Miliar)</li> </ul>	<p>Dit. Perkim :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan ini sangat dukung karena perlu melihat Papua Barat adalah lokus <i>stunting</i>, daerah 3TP, dan capaian akses air minum juga rendah, kaimana, teluk wondama, manokwari, dan sorong diusulkan</li> <li>- Fakfak, teluk bintuni dan manokwari selatan belum diusulkan</li> <li>- Saat ini masih verifikasi teknis sehingga bisa diakomodir</li> </ul>				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
14	pembangunan akademi komunitas	1	1	Paket	Kab. Fak Fak	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Tidak Direkomendasikan karena lebih menyarankan ke PSDKU dan	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4264 - Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasn Dunia Usaha dan Dunia Industri	QDB - Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	001 - Satuan Pendidikan Vokasi Yang Selaras Dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	<b>kerjasama dengan politenik Negeri Fakfak agar lebih mempermudah program pembelajaran, serta dapat didanai melalui Otsus, tetapi tetap perlu pendampingan dari pusat</b>
<b>Catatan dan Tanggapan</b>						
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
		<p>Bappeda Provinsi Papua Barat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP 106 adalah satu perpindahan SMA SMK ke kabupaten dimana urusan utama untuk akademi komunitas</li> <li>- Di Fakfak dibangun politeknik karena ada hubungan kemanfaatan dengan industry pupuk, namun prodi tidak menjurus ke akademi komunitas</li> </ul>	<p>Kemendikbud:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sama dengan komentar PTI yang perlu dipertimbangkan lagi karena belum lihat analisis kebutuhannya</li> <li>- Bisa dilakukan PSDKU dari Politeknik Negeri Fakfak agar penyiapan SDM bisa lebih pas</li> <li>- RO di Kemendikbud 5 tahun terakhir tidak ada pembangunan baru</li> <li>- Dalam pagu indikatif dan sebelumnya untuk pembangunan fisik melalui SBSN yang lebih diarahkan untuk pengembangan Politeknik</li> <li>- Kalau Fakfak dari sisi bantuan intervensi pusat melalui SBSN berupa pengajar dan kelengkapan lainnya, apabila nanti akan mendirikan akademi komunitas maka dari sisi dosen dan perizinan perlu disiapkan</li> <li>- PSDKU tidak sulit persaingannya karena ada prioritas dan fokusnya</li> <li>- Dalam Renstra K/L tidak ada pembangunan AKN</li> </ul>	<p>Dit. PTI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lulusannya D1 dan D2, perlu melihat kembali demand nya dan merekomendasikan peluang sekolah vokasi melalui PSDKU</li> <li>- Tidak dapat diakomodir karena perlu dilihat demandnya</li> <li>- Pemprov bisa melakukan pendekatan dengan Politeknik Fakfak untuk pengembangan PSDKU</li> <li>- PSDKU nanti Poltek Fakfak perlu pengusulan ke Ristek Dikti untuk pembangunan lokasi baru</li> <li>- Kalau PSDKU bisa melalui belanja K/L apabila menjadi prioritas, tetapi SBSN 2025 sudah tidak bisa</li> </ul> <p>Pimsid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan ini bisa didanai melalui Otsus sesuai dengan kewenangannya</li> </ul>		
<b>No</b>	<b>Usulan</b>	<b>Volume</b>		<b>Satuan</b>	<b>Lokasi Kab/Kota</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan		
15	pembangunan ruang kuliah di UNIPA dan laboratorium terpadu	2	2	Paket	Kab. Manokwari Selatan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Tidak Direkomendasikan		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		DK - Program Pendidikan Tinggi	4471 - Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	RAA - Sarana Bidang Pendidikan		003 - Sarana Perguruan Tinggi Yang Direvitalisasi (SBSN)			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024		Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024		Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
16	pembangunan pabrik pakan ternak	1	1	Unit	Kab. Manokwari	Kementerian Pertanian	Tidak Direkomendasikan dan diarahkan melalui DAK dengan nomenklatur Bank Pakan yang akan		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
HA - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas		1783 - Peningkatan Produksi Pakan Ternak		RAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup		001 - Sarana Pakan			

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

No	Usulan	Catatan dan Tanggapan				melewati tahap penentuan lokpri dan menu, serta perlu kelengkapan RC	
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas			
		<p>Bappeda Provinsi Papua Barat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil riset Unipa dan Dinas Pertanian 60-70% sangat berpotensi</li> <li>- Hasil telur dan ternak sangat tinggi nilai ekonomisnya</li> </ul> <p>Dinas Perindag Papua Barat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan sejak 2020 dari Inpres Percepatan Papua yang sudah disarankan</li> <li>- Sejak tahun 2022 sudah diserahkan proposalnya ke Menteri Investasi</li> <li>- Terkait lahan dan tanah sudah <i>clean and clear</i></li> <li>- Tahun 2022 melalui Dana Otsus sudah menyusun kajian UKL UPL</li> <li>- Kebutuhan akan daging dan telur masih dari luar</li> </ul>	<p>Kementerian Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RO nya lebih ke pengembangan pakan ternak dan unggas, dan usulan ini lebih kepada menu DAK</li> <li>- Penerima seharusnya dari Kelompok Tani</li> <li>- Tidak ada alokasi RO terkait pabrik pakan</li> <li>- Perlu penetapan lokpri dan menu DAK dahulu</li> </ul>	<p>Dit. Pangan dan Pertanian :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokus dan menu masih dalam tahap exercise sehingga bisa disiapkan dahulu RC nya</li> <li>- B</li> </ul>			
		Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
17	Pembangunan air baku di KI Bintuni dan KI Fak-fak	2	2	Paket	Kab. Fak Fak dan Kab. Teluk Bintuni	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Tidak Direkomendasikan karena RC belum siap
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	
		Program	Kegiatan	KRO		RO	
		FC - Program Ketahanan Sumber Daya Air	5040 - Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku	RBS - Prasarana Jaringan Sumber Daya Air		001 - Prasarana air baku yang dibangun	

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

Catatan dan Tanggapan		
Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
<p>Dinas PU Papua Barat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk kawasan industri Bintuni sudah pernah ada perencanaan, namun hasilnya belum diketahui oleh Dinas PU</li> <li>- Kemungkinan DED nya sudah ada</li> <li>- Bagaimana kolaborasi dari 2 kementerian untuk berkolaborasi terkait RC nya</li> <li>- Fafak baru ditetapkan sebagai PSN</li> <li>- Penyediaan air baku untuk KI dan kawasan permukiman. Pemerintah menyiapkan perpipaan sampai kawasan industri</li> <li>- Titik air baku untuk KI belum diketahui</li> <li>- Tahapan kedepan akan disiapkan RC nya, sehingga 2026 sudah dapat dilaksanakan kegiatan fisiknya</li> </ul> <p>Bappeda Provinsi Papua Barat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bulan lalu ada kunjungan ke Pupuk Kaltim, baru ada perencanaan KI Faafak menjadi PSN</li> <li>- KI Bintuni belum pernah mendengar perusahaan apa saja yang akan masuk</li> </ul>	<p>Dit. SDA - Kementerian PUPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai dengan penjelasan Pemda, sampai saat ini RCnya belum tersedia</li> <li>- Diarahkan untuk ada informasi terkait timeline terkait rencana operasionalisasi KI (dikhawatirkan KI nya berpindah lokasi)</li> <li>- Jika RC nya belum tersedia maka belum ada dukungan dari KL</li> </ul>	<p>Dit. SDA Bappenas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk RC nya belum siap, diharapkan RC sudah dapat disiapkan di tahun ini. Agar tahun depan dapat diusulkan</li> <li>- Karena usulan ini mendukung RAPP</li> </ul>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		- Akses jalan sebaiknya di percepat dari Fafak ke Koka atau rute kedua ke Bomberay							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
18	pengembangan wisata teluk triton	1	1	Paket	Kab. Kaimana	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Direkomendasikan dengan catatan Pemda diminta untuk menajamkan atau menyiapkan proposal usulan kepada Kemenparekraf, serta akan menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan Renstra Kemenparekraf		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		EA - Program Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	4308 - Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata	QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		001 - Masyarakat yang memperoleh Fasilitasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat : - Berharap kegiatan penguatan kapasitas masyarakat berupa bimtek dan promosi, sehingga ada penguatan SDM - Di Papua Barat ada program jangka panjangnya berupa Lembaga formal		PSDM Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif : - Usulan ini sudah ada diskusi dengan Direktur, tetapi masih banyak hal yang belum pasti termasuk penyusunan Renstra sehingga belum dapat memberikan komitmen untuk mengakomodir		Dit. IPEK : - Perlu penajaman detail usulan seperti apa - Pengembangan untuk RPJMN lebih fokus di raja ampat, sedangkan untuk ini bisa melalui DAK non fisik bisa untuk pelatihan					

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		<p>berupa sekolah pariwisata untuk meningkatkan daya Tarik wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemenparekraf sudah melakukan kajian akademik untuk sekolah pariwisata dari tahun 2018 dan dilakukan di 3 provinsi, salah satunya di Papua Barat. Diharapkan sekolah pariwisatanya negeri agar mencari ilmu tidak perlu keluar provinsi</li> <li>- Diharapkan untuk Teluk Triton bisa seperti Raja Ampat dan potensinya tidak diragukan, kawasannya berupa cagar budaya terutama Kemendikbud bisa dijadikan salah satu program untuk melakukan kajian kembali sebagai salah satu cagar, sehingga tidak ada kerusakan dalam pengelolaan pariwisatanya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih menunggu program yang pemerintahan baru dengan alokasi anggaran yang diamanatkan, sehingga belum menentu</li> <li>- Bisa melalui pengusulan proposal atau DAK, untuk menyampaikan proposal kebutuhan dan analisis kebutuhan untuk tahun depan yang nantinya akan diseleksi</li> <li>- Ada pengembangan 10 DPP yaitu untuk Raja Ampat salah satunya sebagai fokus, tetapi untuk Teluk Triton bisa melalui mekanisme DAK non fisik atau proposal</li> <li>- Perlu ada gambaran kebutuhan dan jenis pelatihannya, bisa dibuat semacam bentuk proposal</li> </ul> <p>Biroren Kemenparekraf:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DAK non fisik dan fisik adalah <i>inline</i> untuk menjadi lokus non fisik cukup sulit maka akan ragu jika diakomodir tapi melalui DAK non fisik</li> </ul>					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
19	pendidikan dan pelatihan tenaga kerja	100	100	Orang	Provinsi Papua Barat	Kementerian Ketenagakerjaan	Direkomendasikan	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata		
		Program	Kegiatan		KRO			RO

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4057 - Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	SCO - Pelatihan Vokasi	038 - PBK Provinsi Papua Barat				
<b>Catatan dan Tanggapan</b>									
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>					
		Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024	Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024	Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
20	perluasan tanaman kopi	20	20	Unit	Kab. Pegunungan Arfak	Kementerian Pertanian	<b>Tidak Direkomendasikan</b>		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5888 - Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Tahunan	RAI - Sarana Pengembangan Kawasan		006 - Kawasan Kopi			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
				<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024	Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024	Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024					

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
21	Pembangunan Bandar Udara Baru Wasior Izaak Samuel Kijne	1	1	Unit	Kab. Teluk Wondama	Kementerian Perhubungan			
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	4645 - Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	RBE - Prasarana Bidang Konektivitas Udara		001 - Bandar Udara Baru			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
Bappeda Provinsi Papua Barat : - Secara usulan pada Rakortek adalah Pegunungan Arfak tetapi diganti menjadi Wasior Baru, sehingga beberapa dokumen kelengkapan sudah diupload dalam Krisna - Kesiapan teknis sudah ada intervensi pada Pemda Kabupaten seperti pelepasan lahan dan Pemprov sudah melakukan <i>land clearing</i> - Lahan dan sertifikat masih dalam proses - Tanggal 25 Maret sudah ada pembahasan penajaman usulan bandara baru dan sudah disepakati RPJMN 2025-2029		Kementerian Perhubungan - Masih dalam proses persetujuan Menhub terkait penetapan lokasinya karena masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi - Bandara ini masuk dalam RPJMN 2025-2029 karena belum terlaksana di RPJMN sebelumnya, sehingga masih menunggu akan masuk dalam RPJMN selanjutnya - Perlu disiapkan lahan, jalan akses, dan RC perlu diperdalam - Untuk 2025 pada pagu indikatif, pengusulan bandara baru masih belum bisa karena keterbatasan anggaran pagu		Dit. Transportasi : - Sudah ada koordinasi dengan Bappenas, belum dengan Kemenhub untuk Bandara Baru akan 2 minggu lagi - Bandara Wasior baru sudah masuk RPJMN 2025-2029 dan sifatnya <i>carry over</i> dengan catatan ada keterlambatan RC Pemda - Hasil 25 Maret lalu , ada poin terkait penyelesaian lahan dan pelok yang sudah dibubuhi tandatangan Menhub agar segera diselesaikan oleh Pemda - RPJMN berikutnya akan terus masuk radar dan tidak berarti tidak ada harapan, sehingga karena kesiapan sudah cukup					
							<b>Direkomendasikan dengan catatan perlu kelengkapan lahan, RTT, RC, dan pelok, serta akan dibahas di TM agar tidak hilang</b>		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahun ini diusahakan selesai untuk pelepasan lahan dan penlok</li> <li>- Perlu bantuan pemerintah pusat terkait penlok yang sudah sejak tahun 2019</li> </ul> <p>Dinas Perhubungan Papua Barat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai kelengkapan, penyiapan lahan dari Pemda Kabupaten menjadi penting</li> <li>- Tahun kemarin baru melaksanakan pembukaan lahan dan sedang berposes lanjutannya oleh Pemda Kab. Teluk Wondama</li> <li>- Usulan ini memang diperintahkan oleh Bapak Presiden</li> <li>- RPP juga perlu diproses oleh Kab. Teluk Wondama</li> <li>- Kepemilikan masih berada di Kab. Teluk Wondama</li> </ul> <p>Sekda Kab. Teluk Wondama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persetujuan Kemenhub terkait penlok yang belum keluar padahal syarat sudah lengkap</li> <li>- Bandara ditargetkan selesai pada tahun 2027 untuk bisa digunakan pada acara Sidang Sinode, dengan jumlah tamu targetnya 12 ribu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu persetujuan Penlok dan serah terima aset untuk Kemenhub bisa melakukan pembangunan</li> <li>- Kalau untuk 2025 masih menunggu arahan mengingat masih banyak yang belum dilengkapi mengingat sudah di tahap indikatif</li> </ul>	<p>banyak, apabila boleh diakomodir dengan catatan pemda harus menyelesaikan lahan dan pelok, serta Bappenas akan melakukan <i>exercise</i> sampai akhir RPJMN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk Kemenhub perlu bersama mengawal untuk kesiapan pemda</li> <li>-</li> </ul>			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

<b>22</b>	Pembangunan TPA Sampah (TPAS) Manokwari	1	1	Unit	Kab. Manokwari	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<b>Direkomendasikan dengan catatan Pemda perlu memenuhi kelengkapan dokumen seperti RC dan perlu penyesuaian anggaran, apabila RC tidak dipenuhi maka lokasi tetap di Kab. Manokwari Selatan sesuai dengan kesepakatan Konreg</b>		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		05 - Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission		15 - Lingkungan Hidup Berkualitas			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		IA - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4840 - Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		007 - Sistem Pengelolaan Persampahan Skala Kota			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
<p>Bappeda Provinsi Papua Barat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan TPA yang sudah tersedia AMDAL, sertifikat tanah, dll sehingga perlu pembangunan TPA baru sehingga menjadi pertimbangan untuk <i>sanitary landfill</i></li> <li>- Ini menjadi <i>Pilot Project</i> di Papua Barat karena belum ada TPA berbasis <i>sanitary landfill</i></li> </ul> <p>Dinas PUPR Papua Barat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPA sudah berumur 10 tahun dan berdampingan dengan perkantoran Papua Barat (Kab. Manokwari) yang berjarak sekitar 1 km</li> <li>- Pemeliharaan masih kurang terawat dan masih memprihatinkan, sudah berbau dan lalat menyebar sehingga perlu ada penanganan untuk mengembalikan ke fungsi awal</li> </ul>		<p>BPIW – Amanada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada bahasan di Konreg, dan karena pagu indikatif sudah keluar maka belum masuk, yang sudah masuk TPST Manokwari Selatan</li> <li>- Mungkin bisa diusulkan menu untuk DAK</li> <li>- Nanti mungkin perlu adanya penyesuaian nomenklatur usulan</li> <li>- Atau bisa juga diusulkan untuk tahun berikutnya</li> </ul> <p>Kementerian PUPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kalau di Konreg yang diakomodir adalah TPST sedangkan yang diusulkan adalah TPA maka beda tipe</li> </ul>		<p>Dit. Permukiman :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait kesiapan perlu ada penjelasan dari Pemda</li> <li>- Untuk optimalisasi TPA perlu dibarengi dengan peningkatan pengelolaan sampah, sehingga sampah yang diangkut hanya berupa residu saja</li> <li>- Peningkatan pengelolaan sampah adanya berupa optimalisasi</li> <li>- Adanya TPS3R untuk menu DAK</li> <li>- Bisa merekomendasikan, tetapi masih bingung teknisnya pembangunan atau perluasan</li> </ul> <p>Pimsid 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan ini menjadi prioritas bagi kewilayah Ibukota Provinsi</li> <li>- Mungkin bisa diakomodir dengan catatan bisa dilengkapi kapan targetnya dan Pemda bisa</li> </ul>					

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mungkin diperlukan adanya relokasi</li> <li>- Kapasitas sudah tidak memadai atau sudah penuh maka perlu pembangunan baru, sehingga ini menjadi usulan Dinas LH Kabupaten Manokwari, yang ditindaklanjuti Pemprov berupa DED dari tahun lalu dengan catatan tidak pindah lokasi, RC sudah disiapkan</li> <li>- Kurang lebih 40 Ha</li> <li>- Daerah masih fokus pada pengelolaan TPA sampah yang diusulkan, sedangkan TPS3R perlu luas lahan yang banyak dan dokumen lainnya</li> </ul> <p>Perwakilan BP3OKP:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penduduk Manokwari Selatan masih lebih rendah dibandingkan dengan Kab. Manokwari</li> <li>- Urgensi pembangunan lebih kepada Kab. Manokwari</li> </ul>		<p>berkoordinasi dengan Kab. Manokwari Selatan juga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah bisa di berita acara untuk usulan ini merevisi hasil Konreg kemarin sehingga</li> <li>- Mungkin aka nada penyesuaian anggaran yang bertahap tetapi RC juga perlu ditargetkan kapan</li> </ul> <p>Geotagging: Perlu penitikan lebih lanjut</p>				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
23	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi BPPSDMP	51	51	Orang	Provinsi Barat dan Kab. Manokwari	Kementerian Pertanian	Tidak Direkomendasikan dengan catatan usulan dapat diusulkan ke BPPSDMP	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
	DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	1810 - Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian		SCC - Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan		001 - Pelatihan Vokasi Pertanian bagi Aparatur		

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

		Catatan dan Tanggapan		
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
		<p>Bappeda Provinsi Papua Barat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di daerah sudah ada SK penyuluhnya sehingga ingin pelatihan dari BPPSDMP, dengan tujuan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian</li> <li>- Penyuluh pertanian yang dimaksud adalah aparatur sebagaimana di SK</li> <li>- Usul untuk dilibatkan PPL</li> </ul>	<p>Kementerian Pertanian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Butuh kejelasan dahulu kegiatannya seperti apa</li> <li>- Selama ini kegiatan yang sifatnya vokasi hanya di anggaran pusat, sehingga pelatihan aparatur pada UPT saja</li> <li>- Sehingga lebih mudah pelatihan bagi non aparatur dan bisa secara intensif dengan BPPSDMP untuk 2025 apakah masih ada slot untuk petani, namun diutamakan biasanya pada staf kementan</li> <li>- Bukan ingin membatasi karena usulan berbeda dengan kegiatan lainnya</li> <li>- Kalau ingin mengusulkan maka bisa diusulkan melalui badan SDM, mengingat masih menunggu TM</li> <li>- Tidak menutup kemungkinan untuk usulannya</li> <li>- Perlu diketahui bahwa anggaran untuk kementan saat ini sangat kecil sekali</li> <li>- Posisi non alokasi Dekon TP biasanya dari pusat ke daerah, tetapi belum ada info dari BPPSDMP, sehingga solusi tetap memberikan peluang</li> </ul>	<p>Catatan sesuai dengan catatan Rakortekrenbang 2024</p>

**NOTULENSI**  
**PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tahapan sekarang masih pendalaman TM SBPI, dan kemungkinan akan sulit diakomodir</li> <li>- Disarankan tidak diakomodir dan bisa diusulkan untuk 2025 berupa pelatihan</li> </ul>		
--	--	--	--	--	--

**3. REKAPITULASI**

HASIL KESEPAKATAN	TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN
Direkomendasikan	<b>15</b>
Tidak Direkomendasikan	<b>8</b>
Tidak Terbahas	-